



Analisis Keuangan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Di Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2019-2023

Siti Nurain Pakaya*¹, Rio Monoarfa², Ayu Rakhma Wuryandini³

^{1,2,3}Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

*ain040042@gmail.com, rio@ung.ac.id, ayurakhma@ung.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel

Tanggal Submit 21 Desember 2024

Tanggal revisi 15 Januari 2025

Tanggal Accepted 20 Februari 2025

Key words:

Rasio Keuangan Pemerintahan,
Realisasi Anggaran, Kinerja
Keuangan

10.36805/akuntansi.v10i1.10058

Open access under Creative

Common Attribution-ShareAlike

(CC-BY-SA)



ABSTRACT

This study aims to analyze the financial performance of the Gorontalo Regency Government through various financial ratio analyses, including independence, effectiveness, efficiency, degree of decentralization, and capital dependence during the 2019-2023 fiscal year. This study uses a descriptive quantitative approach by analyzing secondary data in the form of the Gorontalo Regency Government's Budget Realization Report (LRA) for 24 quarterly reports for the 2019-2023 period, which were obtained through documentation methods from the Regional Finance and Assets Agency, with data analysis techniques including the calculation of the ratio of independence, effectiveness, efficiency, degree of decentralization, and regional financial dependence. This study provides valuable insights for improve the financial performance of the Gorontalo Regency Government through a comprehensive evaluation of the ratio of independence, effectiveness, efficiency, degree of decentralization, and regional financial dependence for the 2019-2023 period

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui berbagai analisis rasio keuangan, meliputi kemandirian, efektivitas, efisiensi, derajat desentralisasi, dan ketergantungan modal selama tahun anggaran 2019-2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menganalisis data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Gorontalo selama 24 laporan triwulan periode 2019-2023, yang diperoleh melalui metode dokumentasi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah, dengan teknik analisis data meliputi perhitungan rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, derajat desentralisasi, dan ketergantungan keuangan daerah. emuan ini memberikan wawasan yang berharga untuk meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui evaluasi komprehensif rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, derajat desentralisasi, dan ketergantungan keuangan daerah periode 2019-2023

1. Pendahuluan

Pemerintahan memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat. Melalui pemerintahan, kebijakan-kebijakan publik disusun, diterapkan, dan diawasi untuk memastikan tercapainya tujuan bersama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Di Indonesia, sistem pemerintahan yang diterapkan adalah sistem desentralisasi, di mana sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Hal ini bertujuan agar pelayanan publik dapat lebih mudah diakses dan lebih sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap daerah (Maulina & Rhea, 2019).

Desentralisasi membawa implikasi besar pada aspek pengelolaan keuangan di tingkat daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola

anggaran dan sumber daya keuangan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat menggali potensi wilayahnya sendiri, mengoptimalkan sumber daya lokal, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk membiayai pengeluaran dan program-program pembangunan. Pengelolaan anggaran daerah yang efektif menjadi dasar dalam mencapai kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah (Dian Mawardi et al., 2022). Pentingnya pengelolaan anggaran daerah yang baik menjadi semakin relevan dalam memastikan ketercapaian program-program pembangunan dan pelayanan publik. Dalam konteks ini, keuangan daerah tidak hanya dipandang sebagai sarana pengelolaan dana, tetapi juga sebagai instrumen yang strategis untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pengelolaan yang efektif dan efisien akan mencerminkan bagaimana anggaran daerah digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi. Untuk mencapai pengelolaan yang baik, pemerintah daerah perlu memiliki sistem evaluasi dan pengukuran kinerja yang efektif, terutama dalam hal keuangan. Pengukuran kinerja keuangan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mengelola anggaran dan sumber daya keuangan dengan baik. Dengan adanya pengukuran ini, pemerintah dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan anggaran serta merumuskan langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kinerja keuangan ke depannya (Aditya, 2022).

Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah yang berguna untuk mengelola sumber keuangan yang terdapat pada daerah itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan (Nuzullestary & Mulyaningsih, 2021). Kesehatan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan yang baik, ini dapat membuat wilayah tersebut lebih kuat dan berdaya dibandingkan dengan wilayah lain. Faktor kinerja keuangan menjadi faktor penting yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pengukuran kinerja akan memberikan umpan balik atas rencana yang telah diimplementasikan (Trianto, 2016). Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan analisis laporan keuangan. Melalui analisis keuangan, pemerintah dapat mengidentifikasi sejauh mana pengelolaan sumber daya keuangan daerah telah dilakukan dengan baik dan efisien. Hal ini tidak hanya penting untuk perencanaan anggaran, tetapi juga sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan dan strategi pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang. Dalam upaya untuk mengukur kinerja keuangan daerah, terdapat berbagai metode dan teknik yang dapat digunakan, salah satunya adalah analisis rasio keuangan. Rasio-rasio keuangan ini memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan pemerintah daerah. Lima rasio yang sering digunakan dalam analisis keuangan daerah adalah rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio belanja daerah, rasio desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan. Masing-masing rasio ini memiliki fokus yang berbeda namun saling melengkapi dalam menggambarkan bagaimana keuangan daerah dikelola dan sejauh mana pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pendapatan, mengontrol pengeluaran, dan mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan. Pengukuran ini juga dapat menunjukkan kemampuan daerah dalam mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat (Mataris & Digdowiseiso, 2022).

Penelitian ini berfokus pada objek atau tempat penelitian di Pemerintah Kabupaten Gorontalo, yang mencakup pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta kinerja fiskal yang tercermin dalam laporan keuangan daerah seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Analisis ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai rasio keuangan, seperti rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan guna mengidentifikasi sejauh mana pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah serta mengoptimalkan pelayanan publik.

Data yang digunakan dalam analisis ini berasal dari dokumen anggaran dan laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo selama beberapa tahun terakhir, memberikan gambaran yang jelas mengenai pola pengelolaan keuangan dan pencapaian kinerja fiskal. Kabupaten Gorontalo, sebagai salah satu daerah di Indonesia, menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif. Seperti banyak daerah lain, Kabupaten Gorontalo memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya keuangan dan potensi PAD yang masih belum optimal. Ketergantungan pada dana alokasi dari pemerintah pusat masih menjadi karakteristik utama dalam struktur anggaran daerah. Hal ini menunjukkan pentingnya evaluasi kinerja keuangan untuk menilai kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya yang ada dan mendorong kemandirian keuangan. Berikut adalah Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo

lo
Tahun
2019-
2023.
Tab
el 1.
Anggara
n dan
Realisasi

Tahun	Anggaran	Realisasi	Presentase capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Presentase capaian (%)
	Pendapatan (Rp)	Pendapatan (Rp)		Belanja (Rp)	Belanja (Rp)	
2019	1.537.963.367.536	1.499.154.604.216,41	97,48	1.654.903.928.400	1.542.630.736.787,48	93,22
2020	1.488.426.104.548,40	1.408.590.213.911,88	94,64	1.515.696.646.369,40	1.392.206.507.241,16	91,85
2021	1.410.927.542.457,00	1.351.193.921.844,92	95,77	1.811.819.904.596,79	1.541.309.144.839,65	85,67
2022	1.385.654.283.702	1.255.100.044.662,64	90,58	1.503.882.283.702	1.475.435.901.270,04	98,11
2023	1.473.409.178.386	1.352.281.735.989,22	91,78	1.485.641.523.747	1.343.406.170.962,09	90,43
Rata-Rata Capaian			94,05			91,85

Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2019-2023

Anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah periode 2019-2023 belum menunjukkan hasil yang baik, ada faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain kemandirian keuangan daerah, kinerja keuangan daerah dan belanja modal. Fluktuasi ini menimbulkan berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif. Salah satu aspek utama yang perlu diperhatikan adalah kemandirian keuangan daerah, yang mencakup kemampuan daerah dalam mengelola dan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) tanpa bergantung berlebih pada bantuan pusat. Selain itu, efektivitas dan efisiensi pengelolaan PAD menjadi faktor kritis dalam menentukan seberapa baik daerah dalam memungut dan menggunakan pajak daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Keserasian antara anggaran belanja dan pendapatan daerah adalah aspek lain yang penting, karena ketidaksesuaian dapat menyebabkan defisit atau surplus yang tidak terencana, mempengaruhi stabilitas keuangan. Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya analisis kinerja keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Tumija dan Ghina Sinta (Tumija & Sinta, 2022) menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Cilacap memiliki rasio keserasian yang baik, dengan sebagian besar anggaran yang dialokasikan untuk belanja operasi daerah. Namun, rasio kemandirian keuangan daerah masih rendah, menunjukkan ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat. Penelitian yang dilakukan Syaifullah Sofyan (Syaifullah Sofyan, 2022) menunjukkan bahwa rasio efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan di Provinsi Banten berada pada kriteria yang baik, dengan rasio

efektivitas di atas 100% . Namun, rasio keserasian menunjukkan bahwa ada ketidakseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2018) menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dengan pendekatan yang lebih deskriptif, mengandalkan data agregat seperti APBD tanpa memperhatikan rasio-rasio keuangan yang lebih spesifik. Penelitian ini lebih banyak membahas mengenai pembiayaan dan defisit anggaran pemerintah daerah, namun tidak menyelidiki lebih dalam tentang efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran atau kemandirian keuangan daerah. Variabel yang digunakan pun terbatas pada indikator dasar seperti pendapatan dan belanja daerah. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Hidayat (2017) lebih fokus pada hubungan antara komposisi struktur belanja dan rasio kemandirian keuangan. Meskipun begitu, penelitian ini masih terbatas pada analisis kemandirian keuangan saja tanpa melihat keseluruhan dimensi kinerja keuangan, seperti efektivitas pengelolaan anggaran dan efisiensi belanja daerah. Pendekatan yang digunakan pun lebih bersifat kualitatif dan deskriptif, dengan memanfaatkan data sekunder dari laporan keuangan tahunan pemerintah daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif, yang memungkinkan peneliti untuk memberikan analisis yang lebih objektif dan sistematis. Peneliti akan menggunakan data numerik dan rasio keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangan daerah secara lebih akurat. Ini menjadi pembeda yang signifikan dengan penelitian terdahulu, yang cenderung lebih mengandalkan analisis kualitatif atau data agregat. Melalui penggunaan metode kuantitatif dan fokus pada rasio-rasio kinerja keuangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan terukur mengenai pengelolaan keuangan daerah, yang berguna untuk perbaikan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang Analisis Keuangan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Di Pemerintah Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo selama tahun anggaran 2019-2023. Dengan menggunakan analisis rasio keuangan daerah, termasuk rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan. penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja keuangan daerah.

2. Tinjauan Pustaka

Landasan Teori

2.1 Teori Keagenan

Teori agensi pertama kali diperkenalkan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976 dalam artikel mereka yang berjudul "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure". Artikel ini diterbitkan dalam *Journal of Financial Economics* dan menjadi salah satu karya paling berpengaruh dalam bidang keuangan dan teori organisasi. Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak di mana satu atau lebih orang (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka, yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Teori ini berfokus pada masalah yang muncul ketika kepentingan prinsipal dan agen tidak selaras, yang dikenal sebagai "masalah keagenan". Agency problem dalam keuangan daerah sering kali disebabkan oleh ketidakcocokan antara tujuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta kurangnya mekanisme kontrol yang memadai. Salah satu solusi utama untuk mengurangi masalah ini adalah dengan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Pemerintah daerah perlu diharuskan untuk menyediakan laporan keuangan yang jelas, rinci, dan mudah diakses oleh publik. Hal ini akan mempermudah pengawasan oleh pihak terkait, termasuk masyarakat dan lembaga pengawas

eksternal. Selain itu, penerapan sistem informasi keuangan yang terintegrasi juga dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran. Sistem ini memungkinkan pemerintah pusat untuk memantau realisasi anggaran daerah secara lebih langsung dan akurat. Dengan data yang lebih real-time, potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dapat segera terdeteksi dan diatasi sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar.

2.2 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah gambaran dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mencapai tujuan pembangunan, dan menjaga keseimbangan keuangan. Teori ini menjadi dasar dalam memahami penyusunan laporan keuangan di sector public, termasuk penggunaan rasi- rasio keuangan untuk mengukur efesiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di dinas sosial. Pengelolaan keuangan public harus sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti standar akuntansi (SAP), sehingga dapat digunakan untuk menilai kinerja pegawai keuangan. Menurut (Muslim et al., 2023) kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui kebijakan atau ketentuan perundang- undangan selama satu periode anggaran.

2.3 Pengukuran Kinerja

Menurut Mahmudi (2007) kinerja adalah gambaran yang baik, pengukuran kinerja pemerintah daerah baik dalam pengelolaan keuangan serta pengelolaan lainnya. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah (Machmud, 2014) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan.

2.4 Pengukuran Kinerja

Salah satu teknik untuk melakukan Analisis Laporan Keuangan, yaitu dengan melakukan perhitungan penjelsan analisis keuangan daerah dan pendapatan atau dilakukan. (Ruqidul Hajah Alhabsi et al., 2023) rasio keuangan ini hanya menyederharnakan informasi yang menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya.

Ada beberapa cara untuk mengukur kinerja keuangan daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan rasio kinerja keuangan daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah: rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efesiensi, rasio desentralisasi dan rasio ketergantungan keuangan. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah.

2.5 Analisis Common Size

Analisis common size adalah laporan yang membandingkan seluruh nilai yang terdapat dalam laporan keuangan. Tujuan dan manfaat dari analisis ini adalah untuk mempermudah pembaca dalam mengamati perubahan-perubahan yang terjadi pada neraca. Selain itu, analisis common size juga memberikan wawasan mengenai perubahan dalam komposisi, baik dari sisi investasi maupun struktur modal. Dengan menyusun laporan dalam bentuk common size, perusahaan dapat menilai sejauh mana kebijakan operasi, investasi, dan pendanaan yang diambil di masa lalu tepat, serta mengevaluasi kemungkinan kebijakan di masa depan. Penyajian laporan dengan format common size ini memudahkan pembaca dalam menganalisis laporan keuangan, dengan fokus pada perubahan yang terjadi baik dalam neraca maupun laporan laba rugi (Toniga et al., 2021).

2.6 Analisis trend

Analisis trend (tendensi posisi) adalah suatu metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi dari pada keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik, atau bahkan turun. Analisis trend menunjukkan perubahan pada keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam persentase.

3 **Metode Penelitian ← Book Antiqua, 12 pt, Bold**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode analisis rasio keuangan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Pemerintah Kabupaten Gorontalo, tepatnya di Kecamatan Limboto, Provinsi Gorontalo, dengan waktu penelitian pada Oktober-November 2024. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo. Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi. Populasi penelitian adalah laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Sampel penelitian terdiri dari 24 laporan triwulan periode 2019-2023, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling

Penelitian menggunakan lima variabel rasio keuangan:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
2. Rasio Efektivitas PAD
3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
4. Rasio Derajat Desentralisasi
5. Rasio Ketergantungan Keuangan

Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif kuantitatif, meliputi:

- Menghitung masing-masing rasio keuangan
- Membandingkan hasil perhitungan dengan kriteria yang berlaku
- Menginterpretasikan hasil analisis rasio
- Menarik kesimpulan kinerja keuangan daerah

4 **Hasil dan Pembahasan ← Book Antiqua, 12 pt, Bold**

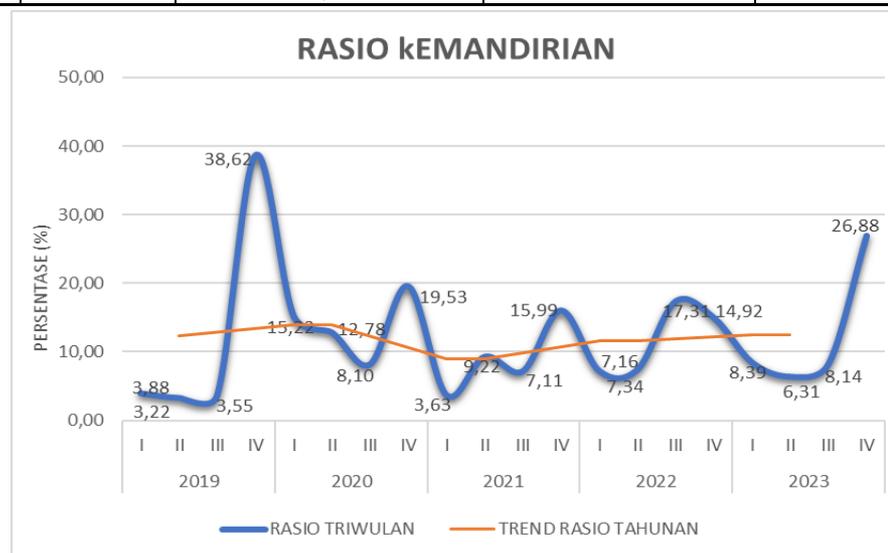
Badan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo merupakan unit organisasi yang berada di bawah koordinasi Asisten Administrasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 55 Tahun 2016. Peraturan ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo. Badan ini memiliki tugas utama mengelola administrasi keuangan daerah Kabupaten Gorontalo dan terdiri dari Sekretariat serta lima bidang: Bidang Pendapatan, Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi, Bidang Aset, serta Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengendalian Pendapatan Daerah. Pembentukan Badan Keuangan didasarkan pada Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 11 Tahun 2018, dengan struktur organisasi yang diatur dalam peraturan tersebut.

Analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo bertujuan untuk menilai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo pada sektor finansial dalam jangka waktu 2019-2023. Rasio yang digunakan meliputi: rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio efisiensi keuangan daerah, rasio desentralisasi, dan rasio ketergantungan keuangan. Data yang dianalisis berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Periode 2019-2023 (Triwulan I-IV), yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo. Hasil analisis kinerja keuangan didasarkan pada penerapan rasio-rasio tersebut.

1. **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)**

Berikut adalah hasil pengolahan data rasio kemandirian keuangan daerah yang dihitung berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo untuk periode 2019 - 2023 Keuangan Daerah (RKKD)

Tahun	Triwulan	Rasio Kemandirian Triwulan (%)	Rasio Kemandirian Tahunan (%)	Kriteria
2019	I	3,88	12,32	pola hubungan instruktif
	II	3,22		
	III	3,55		
	IV	38,62		
2020	I	15,22	13,91	pola hubungan instruktif
	II	12,78		
	III	8,10		
	IV	19,53		
2021	I	3,63	8,99	pola hubungan instruktif
	II	9,22		
	III	7,11		
	IV	15,99		
2022	I	7,16	11,68	pola hubungan instruktif
	II	7,34		
	III	17,31		
	IV	14,92		
2023	I	8,39	12,43	pola hubungan instruktif
	II	6,31		
	III	8,14		
	IV	26,88		



Sumber: Data Diolah Kembali 2025

Berdasarkan tabel data rasio kemandirian keuangan Pemerintah daerah kabupaten Gorontalo periode 2019 - 2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Sumber: Data Diolah Kembali 2025

Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Gorontalo selama periode 2019-2023 menunjukkan tren yang menggambarkan tingkat kemandirian yang masih sangat rendah. Secara berturut-turut, rasio kemandirian keuangan daerah tercatat sebesar 12,32% pada tahun 2019, 13,91% pada tahun 2020, 8,99% pada tahun 2021, 11,68% pada tahun 2022, dan 12,43% pada tahun 2023. Seluruh nilai tersebut termasuk dalam kategori pola hubungan instruktif, yang mengindikasikan bahwa Kabupaten Gorontalo masih sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pola hubungan instruktif ini terus mendominasi, mencerminkan belum adanya peningkatan signifikan dalam tingkat kemandirian keuangan daerah. Kondisi ini menegaskan perlunya perhatian lebih untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber dana eksternal. Dengan tantangan seperti ini, Kabupaten Gorontalo perlu merumuskan strategi yang lebih efektif guna memperkuat kapasitas keuangan daerah sehingga dapat mencapai tingkat kemandirian yang lebih baik di masa depan.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) Kabupaten Gorontalo menunjukkan kinerja keuangan yang tergolong sangat rendah, berada dalam interval 0%-25,00%, yang mencerminkan pola hubungan instruktif, di mana pendapatan dari pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan dengan pendapatan dari pemerintah daerah. penerimaan dana dari pemerintah pusat menyulitkan penganggaran pemerintah daerah, karena ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat semakin meningkat. Rasio kemandirian daerah mengalami penurunan sebesar 4,36%, yang menggambarkan menurunnya tingkat kemandirian Kabupaten Gorontalo, disebabkan oleh dominasi pendapatan transfer yang lebih besar dibandingkan kontribusi masyarakat melalui pajak dan retribusi daerah (komponen utama PAD). Penurunan ini sejalan dengan teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara pemerintah sebagai agen dan rakyat sebagai prinsipal, di mana pemerintah berkepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Thuy & Lim, 2023:301). Peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat memperbesar partisipasi mereka dalam membayar pajak dan retribusi daerah (Dja'wa, 2021). Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang dapat membawa perubahan signifikan dalam kinerja keuangan daerah. Untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo sebaiknya memaksimalkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan dalam anggaran, seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber-sumber PAD lainnya. Selain itu, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga perlu ditingkatkan, karena ini merupakan komponen penting dari PAD yang dapat mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat dan untuk memperkuat otonomi finansial daerah (Arafah et al., 2021). Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo juga perlu mengurangi anggaran yang berasal dari transfer pemerintah pusat (seperti dana perimbangan dan dana lainnya) serta transfer dari pemerintah provinsi (pendapatan bagi hasil pajak). Penggunaan dana yang berasal dari

pendapatan transfer tersebut juga diharapkan tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Dengan cara ini, diharapkan pemerintah daerah dapat semakin mandiri dan tidak terus-menerus bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi (Edison et al., 2022).

2. Rasio Efektivitas PAD (REPAD)

Berikut hasil olahan data rasio efektivitas PAD yang dihitung sesuai dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo.

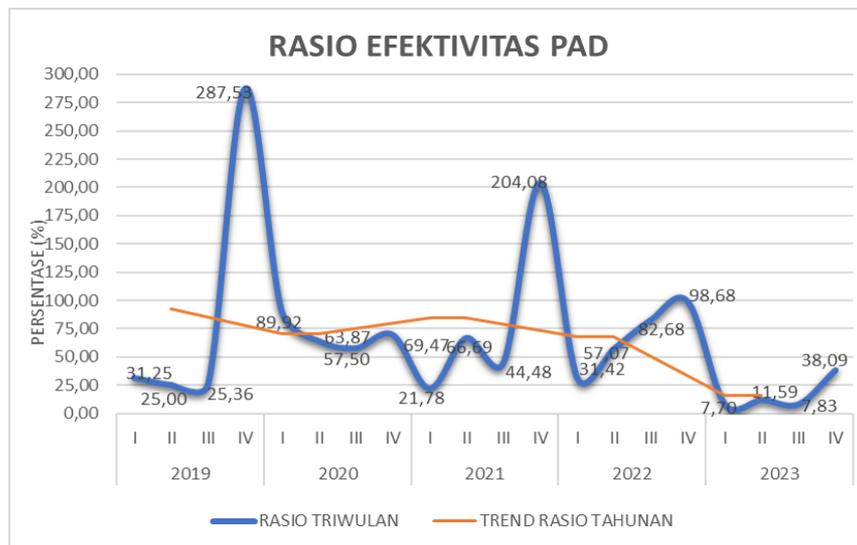
Tahun	Triwulan	Rasio Efektivitas PAD Triwulan (%)	Rasio Efektivitas PAD Tahunan (%)	Kriteria
2019	I	31,25	92,29	Tidak Efektif
	II	25,00		
	III	25,36		
	IV	287,53		
2020	I	89,92	70,19	Tidak Efektif
	II	63,87		
	III	57,50		
	IV	69,47		
2021	I	21,78	84,26	Tidak Efektif
	II	66,69		
	III	44,48		
	IV	204,08		
2022	I	31,42	67,46	Tidak Efektif
	II	57,07		
	III	82,68		
	IV	98,68		
2023	I	7,70	16,30	Tidak Efektif
	II	11,59		
	III	7,83		
	IV	38,09		

Sumber: Data Diolah Kembali 2025

Berdasarkan tabel data rasio kemandirian keuangan Pemerintah daerah kabupaten Gorontalo periode 2019 - 2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Sumber: Data Diolah Kembali 2025

Rasio Pendapatan (PAD) Gorontalo periode



efektivitas Asli Daerah Kabupaten Gorontalo selama 2019-2023

menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Secara berturut-turut, rasio efektivitas PAD tercatat sebesar 92,34% pada tahun 2019, 70,19% pada tahun 2020, 84,26% pada tahun 2021, 67,46% pada tahun 2022, dan 16,30% pada tahun 2023. Meskipun terdapat peningkatan pada tahun tertentu, seperti tahun 2019 dengan rasio sebesar 92,34%, nilai tersebut masih berada dalam kategori tidak efektif menurut kriteria yang berlaku. Secara keseluruhan, rasio efektivitas PAD selama periode lima tahun terakhir (2019-2023) menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo belum mampu mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah secara maksimal. Kondisi ini mencerminkan perlunya upaya lebih intensif dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber pendapatan, memperbaiki sistem pengumpulan PAD, serta merumuskan kebijakan inovatif yang dapat mendukung peningkatan efektivitas dan produktivitas PAD di masa depan.

Rasio efektivitas PAD menunjukkan bahwa nilai rasio masih di bawah 100%, yang mengindikasikan kinerja yang tidak efektif. Selama periode tersebut, rasio efektivitas PAD mengalami penurunan sebesar 18,3%, yang mencerminkan penurunan dalam kemampuan Kabupaten Gorontalo untuk memobilisasi penerimaan PAD, seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber PAD lainnya, sesuai dengan target yang telah ditetapkan (Darmastuti et

al., 2022). Penurunan ini sejalan dengan penerapan teori keagenan, yang menjelaskan hubungan antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Pemerintah memiliki kepentingan untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat, karena peningkatan kesejahteraan tersebut dapat meningkatkan kontribusi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, sehingga anggaran yang telah ditetapkan dapat tercapai (Wahyu Luthvia et al., 2023). Berdasarkan teori kebijakan publik, kebijakan keuangan negara, termasuk refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, diharapkan dapat mencapai keberhasilan dalam kebijakan publik tersebut. Namun, meskipun terdapat perubahan, kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo, berdasarkan rasio efektivitas PAD, tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan selama periode tersebut (Ekonomi et al., 2024).

Untuk meningkatkan efektivitas PAD, pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo perlu memaksimalkan realisasi PAD sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber PAD lainnya. Selain itu, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan perlu ditingkatkan, karena ini merupakan komponen penting dari PAD yang dapat mendukung pembangunan dan pelayanan publik, serta memperkuat otonomi finansial daerah. Pemerintah daerah juga harus menerapkan strategi yang tepat dalam merencanakan anggaran PAD, karena realisasi PAD yang tidak mencapai target dapat mempengaruhi persentase kinerja keuangan yang dilihat dari rasio efektivitas PAD (Marinus Ronal & Albert Agus Massua, 2023).

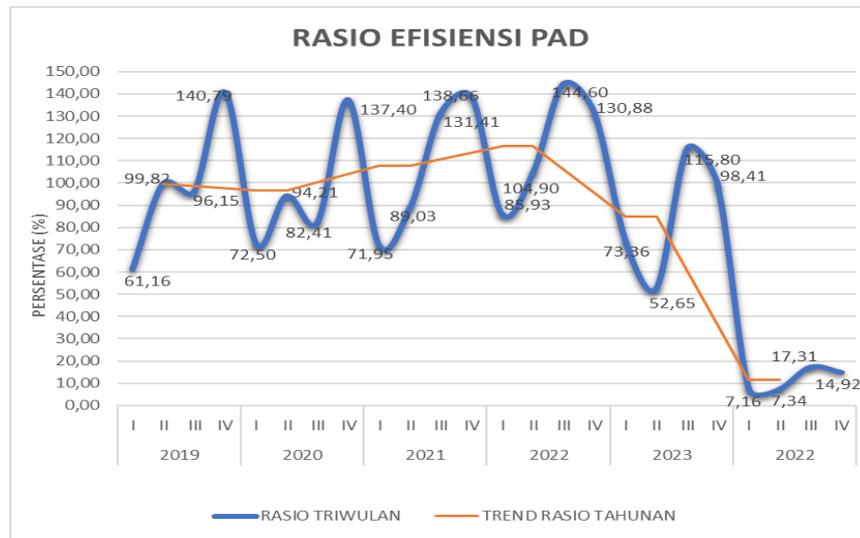
3. Rasio Efisiensi PAD (REKD)

Berikut hasil olahan data rasio Efisiensi PAD yang dihitung sesuai dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo.

Tahun	Triwulan	Rasio Efisiensi Triwulan (%)	Rasio Efisiensi Tahunan (%)	Kriteria
2019	I	61,16	99,48	Efisien
	II	99,82		
	III	96,15		
	IV	140,79		
2020	I	72,50	96,63	Efisien
	II	94,21		
	III	82,41		
	IV	137,40		
2021	I	71,95	107,76	Tidak Efisien
	II	89,03		
	III	131,41		
	IV	138,66		
2022	I	85,93	116,58	Tidak Efisien
	II	104,90		
	III	144,60		
	IV	130,88		
2023	I	73,36	85,06	Tidak Efisien
	II	52,65		
	III	115,80		
	IV	98,41		

Sumber: Data Diolah Kembali 2025

Berdasarkan tabel data rasio efisiensi PAD keuangan Pemerintah daerah kabupaten Gorontalo periode 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: Data Diolah Kembali 2025

Rasio efisiensi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dari tahun 2019 hingga 2023 secara berurutan adalah 99,73%, 96,63%, 107,76%, 116,58%, dan 86,06%. Data ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019 dan 2023, rasio efisiensi keuangan tergolong efisien. Namun, pada tiga tahun lainnya (2020, 2021, dan 2022), rasio tersebut berada dalam kategori tidak efisien karena nilainya melebihi 100%. Secara keseluruhan, rasio efisiensi keuangan daerah selama periode lima tahun terakhir (2019-2023) menunjukkan pola yang beragam. Meskipun, ada tahun-tahun dengan tingkat efisiensi yang memenuhi kriteria, dominasi rasio yang tidak efisien dalam tiga dari lima tahun tersebut mencerminkan perlunya perbaikan dalam pengelolaan anggaran daerah. Hal ini menekankan pentingnya pengendalian belanja dan pengoptimalan penggunaan sumber daya keuangan agar efisiensi dapat ditingkatkan secara konsisten di masa mendatang. Rasio efisiensi menunjukkan bahwa variabel ini dikategorikan sebagai tidak efisien karena persentasenya lebih dari 100%. Rasio efisiensi mengalami penurunan sebesar 6,46%, yang menggambarkan kinerja keuangan yang semakin tidak efisien dalam mengelola belanja daerah, dengan total belanja yang melebihi realisasi pendapatan (Julaeha, 2024). Hal ini sejalan dengan penerapan teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara eksekutif (sebagai agen) dan legislatif (sebagai prinsipal). Lembaga legislatif seharusnya mengawasi pemerintah agar belanja tidak melebihi total pendapatan yang telah direalisasikan, sehingga diharapkan dapat tercapai efisiensi belanja daerah yang lebih baik. Berdasarkan teori kebijakan publik, kebijakan keuangan negara yang mencakup refocusing kegiatan dan realokasi anggaran seharusnya dapat mencapai keberhasilan dalam kebijakan publik (Oktaviani & Marini, 2023). Untuk meningkatkan efisiensi keuangan daerah, pemerintah Kabupaten Gorontalo dapat memaksimalkan realisasi PAD (pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah) serta pendapatan daerah lainnya, seperti hibah, sesuai anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan perlu ditingkatkan karena ini merupakan komponen penting dari PAD yang dapat mendukung pembangunan dan pelayanan publik, serta memperkuat otonomi finansial daerah. Pemerintah daerah juga perlu meminimalkan anggaran dan belanja operasi, seperti belanja pegawai dan barang/jasa, karena hal ini sangat mempengaruhi persentase kinerja keuangan yang dilihat dari rasio efisiensi. Pengendalian realisasi hibah dan bantuan sosial juga penting untuk memastikan bahwa dana yang digunakan tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengurangan total belanja

dan peningkatan total pendapatan akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah semakin efisien (Kondjil et al., 2021)

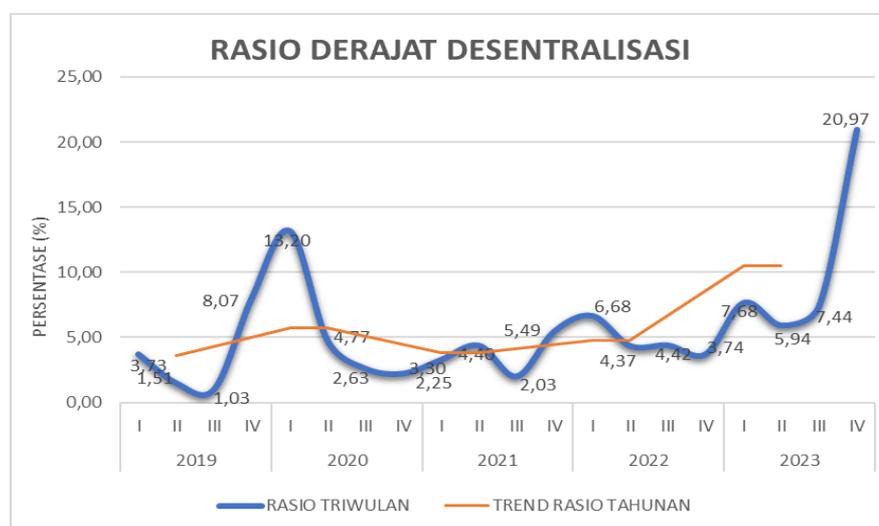
4. Rasio Derajat Desentralisasi

Berikut hasil olahan data rasio derajat desentralisasi yang dihitung sesuai dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo.

Tahun	Triwulan	Rasio Derajat Desentralisasi Triwulan (%)	Rasio Derajat Desentralisasi Tahunan (%)	Kriteria
2019	I	3,73	3,59	Sangat Kurang
	II	1,51		
	III	1,03		
	IV	8,07		
2020	I	13,20	5,71	Sangat Kurang
	II	4,77		
	III	2,63		
	IV	2,25		
2021	I	3,30	3,81	Sangat Kurang
	II	4,40		
	III	2,03		
	IV	5,49		
2022	I	6,68	4,80	Sangat Kurang
	II	4,37		
	III	4,42		
	IV	3,74		
2023	I	7,68	10,51	Kurang
	II	5,94		
	III	7,44		
	IV	20,97		

Sumber: Data Diolah Kembali 2025

Berdasarkan tabel data rasio derajat desentralisasi keuangan Pemerintah daerah kabupaten Gorontalo periode 2019 - 2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: Data Diolah Kembali 2025

Rasio derajat desentralisasi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo selama periode 2019 hingga 2023 menunjukkan hasil yang secara berturut-turut tercatat sebesar 3,59% pada tahun 2019 (kriteria sangat kurang), 5,71% pada tahun 2020 (kriteria sangat kurang), 3,81% pada tahun 2021 (kriteria sangat kurang), 4,80% pada tahun 2022 (kriteria sangat kurang), dan 10,51% pada tahun 2023 (kriteria kurang). Data ini menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir, rasio derajat desentralisasi keuangan daerah di Kabupaten Gorontalo sebagian besar berada dalam kategori sangat kurang. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai kebutuhannya secara mandiri masih sangat terbatas. Meskipun demikian, terdapat sedikit perbaikan pada tahun 2023, di mana rasio tersebut berhasil meningkat dan masuk dalam kriteria kurang. Namun, peningkatan ini masih jauh dari cukup untuk membawa Kabupaten Gorontalo ke tingkat yang lebih mandiri secara finansial. Secara keseluruhan, angka-angka ini mencerminkan tingkat kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya keuangan yang masih rendah, sehingga memerlukan upaya yang lebih serius dan berkesinambungan untuk mencapai perbaikan yang signifikan. Kondisi ini menegaskan pentingnya penerapan strategi yang lebih efektif, tidak hanya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penggalian potensi ekonomi lokal, tetapi juga dalam memperbaiki sistem pengelolaan anggaran agar lebih efisien dan tepat sasaran.

Rasio derajat desentralisasi adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya fiskal, terutama dalam hal pendapatan dan belanja daerah. Rasio ini umumnya dihitung dengan membandingkan proporsi pendapatan atau belanja yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan total pendapatan atau belanja negara yang dikelola oleh pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio derajat desentralisasi, semakin besar otonomi fiskal yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan. Dalam konteks ini, rasio derajat desentralisasi mencerminkan kemandirian fiskal daerah, dimana daerah yang memiliki rasio tinggi diharapkan bisa lebih bebas dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan fiskalnya, serta menyesuaikan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan lokal (Melani et al., 2024). meskipun rasio derajat desentralisasi menunjukkan adanya alokasi kewenangan kepada pemerintah daerah, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah ketimpangan sumber daya antara daerah yang lebih kaya dan daerah yang kurang berkembang. Daerah dengan potensi ekonomi yang tinggi, seperti daerah perkotaan atau yang kaya akan sumber daya alam, cenderung memiliki rasio derajat desentralisasi yang lebih tinggi karena mereka memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar untuk dikelola secara mandiri. Sebaliknya, daerah yang lebih miskin atau dengan kapasitas administratif yang terbatas mungkin menghadapi kesulitan dalam mengelola anggaran secara efektif meskipun memiliki otonomi fiskal. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan dalam kualitas pelayanan publik dan pembangunan antar daerah (Sriwijaya et al., 2005). rasio derajat desentralisasi juga dapat menimbulkan potensi konflik antara pemerintah pusat dan daerah, terutama jika otonomi fiskal yang diberikan tidak disertai dengan sistem pengawasan yang cukup. Pemerintah pusat tetap memiliki peran penting dalam mengatur kebijakan fiskal nasional, serta memastikan adanya pemerataan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara kebijakan desentralisasi yang memberikan otonomi kepada daerah dengan kebutuhan untuk tetap menjaga koordinasi dan pengawasan yang efektif dari pemerintah pusat. Desentralisasi fiskal yang ideal tidak hanya dilihat dari segi rasio derajat desentralisasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran, merencanakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lokal, dan menjamin akuntabilitas dalam penggunaan dana public (Karmeli et al., 2022) Secara keseluruhan, rasio derajat desentralisasi memberikan gambaran tentang sejauh mana desentralisasi fiskal telah dilaksanakan, namun perlu diimbangi dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai

kondisi sosial-ekonomi dan kapasitas masing-masing daerah. Desentralisasi fiskal yang efektif harus mampu mendukung pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menjaga keseimbangan antara otonomi daerah dan tanggung jawab nasional dalam pengelolaan keuangan negara (Mulyani & Fitra, 2023).

5. Rasio Ketergantungan Keuangan

Berikut hasil olahan data rasio ketergantungan keuangan yang dihitung sesuai dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo

Tahun	Triwulan	Rasio Ketergantungan Keuangan Triwulan (%)	Rasio Ketergantungan Keuangan Tahunan (%)	Kriteria
2019	I	96,27	48,31	Rendah
	II	46,97		
	III	29,11		
	IV	20,90		
2020	I	86,71	42,01	Rendah
	II	37,29		
	III	32,52		
	IV	11,52		
2021	I	90,99	46,28	Rendah
	II	41,38		
	III	40,72		
	IV	12,01		
2022	I	93,32	50,87	Sedang
	II	59,54		
	III	25,53		
	IV	25,09		
2023	I	91,58	88,76	Tinggi
	II	94,06		
	III	91,39		
	IV	78,00		

Sumber: Data Diolah Kembali 2025

Berdasarkan tabel data rasio derajat desentralisasi keuangan Pemerintah daerah kabupaten Gorontalo periode 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: Data Diolah Kembali 2025

Rasio ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo selama periode 2019 hingga 2023 menunjukkan variasi yang cukup mencolok. Secara berurutan, rasio ketergantungan keuangan tercatat sebesar 48,31% pada tahun 2019 (kategori rendah), 42,01% pada tahun 2020 (kategori rendah), 46,28% pada tahun 2021 (kategori kurang), 50,87% pada tahun 2022 (kategori sedang), dan 88,76% pada tahun 2023 (kategori tinggi). Data ini mencerminkan adanya peningkatan ketergantungan keuangan yang signifikan pada tahun 2023, sementara rasio pada tahun-tahun sebelumnya berada dalam kategori rendah hingga sedang. Secara keseluruhan, rasio ketergantungan keuangan selama lima tahun terakhir menunjukkan pola yang fluktuatif, dengan kecenderungan peningkatan pada tahun-tahun tertentu. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya serius dalam mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendanaan eksternal, terutama dari pemerintah pusat. Pengelolaan keuangan daerah yang lebih mandiri melalui optimalisasi pendapatan asli daerah menjadi langkah strategis yang penting untuk mengurangi tingkat ketergantungan tersebut dan mencapai kemandirian keuangan yang lebih baik di masa mendatang.

Rasio ketergantungan keuangan adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat untuk membiayai anggaran daerahnya. Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah dana yang diterima daerah dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa daerah sangat bergantung pada alokasi dari pemerintah pusat, sementara rasio yang rendah menunjukkan bahwa daerah memiliki sumber pendapatan lokal yang cukup besar untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan (Caesaktiti et al., 2021). Tanggapan peneliti terhadap rasio ketergantungan keuangan adalah bahwa meskipun adanya ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat dapat membantu daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk tetap menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, ketergantungan yang berlebihan bisa menjadi masalah. Ketika rasio ketergantungan keuangan terlalu tinggi, hal ini dapat mencerminkan ketidakmampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan lokal atau kurangnya kapasitas fiskal untuk mengelola sumber daya secara mandiri, Ketergantungan yang tinggi juga bisa menyebabkan kurangnya fleksibilitas daerah dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, karena keputusan fiskal lebih banyak ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat (Maulana, 2023). Sebaliknya, rasio ketergantungan keuangan yang rendah menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kemampuan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya fiskal secara mandiri, yang dapat meningkatkan otonomi daerah. Namun, penting untuk dicatat bahwa rasio ketergantungan yang rendah tidak selalu berarti daerah tersebut lebih mandiri secara ekonomi. Beberapa daerah mungkin memiliki potensi pendapatan yang terbatas atau kesulitan dalam mengelola pendapatan daerah secara efisien. Oleh karena itu, meskipun rasio ketergantungan dapat memberikan gambaran mengenai ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat, rasio ini harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal, potensi ekonomi daerah, dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah (Dara Nadeya Dinanty et al., 2023). Secara keseluruhan, rasio ketergantungan keuangan harus dilihat sebagai alat untuk mengevaluasi keseimbangan antara otonomi fiskal daerah dan peran penting yang dimainkan oleh pemerintah pusat dalam mendukung daerah-daerah yang lebih miskin atau tertinggal. Pemerintah daerah perlu berupaya untuk meningkatkan kemampuan pendapatan lokal mereka agar lebih mandiri, sementara pemerintah pusat juga harus tetap mendukung daerah dalam memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah (Nalle et al., 2021).

TAHUN 2019		
Rasio	Keterangan	Fluktuasi (%)
Rasio Kemandirian	Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Gorontalo selama periode 2019 menunjukkan tren yang menggambarkan tingkat kemandirian sangat rendah.	12,32%
Rasio Efektivitas	Rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo selama periode 2019 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan.	92,34%
Rasio Efisiensi	Rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo selama periode 2019 menunjukkan bahwa rasio efisiensi keuangan tergolong efisiensi	99,73%
Rasio Derajat Desentralisasi	Rasio derajat desentralisasi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo selama periode 2019 menunjukkan kriteria sangat kurang	3,59
Rasio Ketergantungan Keuangan	Rasio ketergantungan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo selama periode 2019 menunjukkan variasi yang cukup mencolok	48,31%
TAHUN 2020		
Rasio	Keterangan	Fluktuasi (%)
Rasio Kemandirian	Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Gorontalo selama periode 2020 menunjukkan tren yang menggambarkan tingkat kemandirian sangat rendah.	13,91%
Rasio Efektivitas	Rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo selama periode 2020 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan.	70,19%
Rasio Efisiensi	Rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo selama periode 2020 menunjukkan bahwa rasio efisiensi keuangan tergolong efisiensi	96,63%
Rasio Derajat Desentralisasi	Rasio derajat desentralisasi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo selama periode 2020 menunjukkan kriteria sangat kurang	5,71%
Rasio Ketergantungan Keuangan	Rasio ketergantungan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo selama periode 2020 menunjukkan kategori sangat rendah	42,01%
TAHUN 2021		
Rasio	Keterangan	Fluktuasi (%)
Rasio Kemandirian	Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Gorontalo selama periode 2021 menunjukkan tren yang menggambarkan tingkat kemandirian sangat rendah.	8,99%
Rasio Efektivitas	Rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo selama periode 2021 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan.	84,26
Rasio Efisiensi	Rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo selama periode 2021 menunjukkan bahwa rasio efisiensi keuangan tergolong efisiensi	107,76
Rasio Derajat Desentralisasi	Rasio derajat desentralisasi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo selama periode 2021	3,81

	menunjukkan kriteria sangat kurang	
Rasio Ketergantungan Keuangan	Rasio ketergantungan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo selama periode 2021 menunjukkan kategori sangat rendah	46,28
TAHUN 2022		
Rasio	Keterangan	Fluktuasi (%)
Rasio Kemandirian	Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Gorontalo selama periode 2022 menunjukkan tren yang menggambarkan tingkat kemandirian sangat rendah.	11,68%
Rasio Efektivitas	Rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo selama periode 2022 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan.	67,46%
Rasio Efisiensi	Rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo selama periode 2022 menunjukkan bahwa rasio efisiensi keuangan tergolong efisiensi	116,58
Rasio Derajat Desentralisasi	Rasio derajat desentralisasi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo selama periode 2022 menunjukkan kriteria sangat kurang	4,80%
Rasio Ketergantungan Keuangan	Rasio ketergantungan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo selama periode 2022 menunjukkan kategori sangat rendah	50,87%
TAHUN 2023		
Rasio	Keterangan	Fluktuasi (%)
Rasio Kemandirian	Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Gorontalo selama periode 2023 menunjukkan tren yang menggambarkan tingkat kemandirian sangat rendah.	12,43
Rasio Efektivitas	Rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo selama periode 2023 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan.	16,30%
Rasio Efisiensi	Rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo selama periode 2023 menunjukkan bahwa rasio efisiensi keuangan tergolong efisiensi	86,06%
Rasio Derajat Desentralisasi	Rasio derajat desentralisasi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo selama periode 2023 menunjukkan kriteria sangat kurang	10,51%

Berdasarkan data rasio keuangan daerah Kabupaten Gorontalo dari tahun 2019 hingga 2023, terlihat bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih sangat rendah. Hal ini tercermin dari rasio kemandirian yang tidak mengalami peningkatan signifikan, berkisar antara 8,99% hingga 13,91% selama lima tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) juga menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, dengan penurunan tajam pada tahun 2023 sebesar 16,30%, yang sebelumnya berada di angka 67,46% pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan PAD sebagai sumber pendapatan utama daerah (Digdowiseiso & Kaliwattu, 2023).

Sementara itu, rasio efisiensi keuangan daerah umumnya tergolong efisien, meskipun mengalami variasi setiap tahunnya, dengan angka tertinggi sebesar 116,58% pada tahun 2022 dan terendah 86,06% pada tahun 2023. Rasio derajat desentralisasi juga menunjukkan tren yang masih sangat kurang, menandakan bahwa kapasitas daerah dalam membiayai kebutuhan sendiri masih terbatas. Yang cukup mencolok adalah rasio ketergantungan keuangan yang meningkat drastis pada tahun 2023 menjadi 88,76%, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ketergantungan ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Gorontalo semakin sulit mengurangi ketergantungannya terhadap dana dari pemerintah pusat, yang dapat berdampak pada fleksibilitas daerah dalam mengelola keuangan dan membangun kemandirian fiskal (Syam & Zulfikar, 2022). Di sisi lain, rasio derajat desentralisasi Kabupaten Gorontalo masih menunjukkan tren yang sangat kurang, menandakan bahwa kapasitas daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri masih terbatas. Hal ini konsisten dengan penelitian Marliani, (2022) yang menemukan bahwa Kabupaten Bandung memiliki rata-rata rasio derajat desentralisasi yang masih rendah, menunjukkan keterbatasan dalam membiayai pembangunan secara mandiri. Sejalan dengan itu, penelitian Siregar, (2020) juga mengungkapkan bahwa semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi pula tingkat desentralisasi fiskal. Dengan kata lain, rendahnya rasio derajat desentralisasi Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa daerah ini masih sangat bergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat untuk menjalankan program pembangunan dan layanan publik. Yang cukup mencolok dalam penelitian ini adalah meningkatnya rasio ketergantungan keuangan Kabupaten Gorontalo yang mencapai 88,76% pada tahun 2023, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tingginya ketergantungan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gorontalo semakin sulit mengurangi ketergantungannya terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Hasil ini didukung oleh penelitian Juliansyah & Insaniyah, (2023) yang menemukan bahwa Kabupaten Garut juga mengalami tingkat ketergantungan keuangan yang sangat tinggi akibat minimnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Berdasarkan hasil penelitian ini, fenomena rendahnya kemandirian keuangan daerah, fluktuasi efektivitas PAD, efisiensi yang bervariasi, derajat desentralisasi yang rendah, serta tingginya ketergantungan keuangan dapat dikaitkan dengan Teori Keagenan (Agency Theory) yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976). Teori ini menjelaskan hubungan antara principal (pemerintah pusat) dan agent (pemerintah daerah), di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri, namun tetap berada dalam pengawasan pemerintah pusat. Dalam perspektif Teori Keagenan, hasil penelitian ini mencerminkan adanya hubungan principal-agent antara pemerintah pusat sebagai principal dan pemerintah daerah sebagai agent. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri, namun kenyataannya pemerintah daerah masih mengalami ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat. Ketergantungan ini mencerminkan adanya moral hazard, di mana pemerintah daerah tidak memiliki insentif yang cukup kuat untuk mengoptimalkan PAD karena dana dari pusat masih menjadi sumber utama pendapatan daerah. Selain itu, fluktuasi efektivitas PAD dapat dikaitkan dengan asimetri informasi, di mana pemerintah pusat memiliki keterbatasan dalam mengawasi langsung bagaimana pemerintah daerah mengelola pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah daerah, sebagai agen, memiliki informasi yang lebih rinci terkait potensi PAD dan alokasi anggaran, namun tidak selalu menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan optimalisasi pendapatan. Hal ini dapat menyebabkan pengelolaan PAD yang kurang efektif dan kurangnya strategi jangka panjang dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Dari segi efisiensi, meskipun rasio efisiensi keuangan daerah menunjukkan kategori yang cukup baik, variasi dari tahun ke tahun menunjukkan adanya biaya keagenan yang perlu dikendalikan. Biaya keagenan ini mencakup berbagai pengeluaran yang mungkin tidak sepenuhnya efisien dalam mendukung kinerja keuangan daerah. Jika tidak dikelola dengan

baik, hal ini dapat meningkatkan beban fiskal daerah dan menghambat efektivitas penggunaan anggaran. Rendahnya rasio derajat desentralisasi juga dapat dijelaskan melalui teori keagenan. Dalam konteks ini, pemerintah daerah masih mengalami keterbatasan dalam menjalankan otonomi fiskalnya karena sebagian besar pendapatan masih berasal dari pusat. Hal ini menunjukkan bahwa peran principal dalam mengontrol agent masih sangat kuat, yang mengakibatkan daerah tidak memiliki fleksibilitas dalam pengambilan keputusan keuangan. Dengan kata lain, semakin rendah rasio derajat desentralisasi, semakin besar intervensi pemerintah pusat dalam kebijakan fiskal daerah, yang berpotensi membatasi kreativitas pemerintah daerah dalam mengembangkan sumber pendapatan sendiri. Peningkatan rasio ketergantungan keuangan hingga 88,76% pada tahun 2023 semakin memperjelas bahwa Kabupaten Gorontalo masih jauh dari kemandirian fiskal. Dalam perspektif teori keagenan, kondisi ini mencerminkan adanya free-rider problem, di mana pemerintah daerah cenderung mengandalkan dana dari pusat tanpa berusaha secara optimal untuk meningkatkan PAD. Hal ini menunjukkan perlunya mekanisme insentif yang lebih kuat agar pemerintah daerah terdorong untuk menggali potensi pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa hubungan principal-agent dalam pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Ketidakseimbangan informasi, moral hazard, dan biaya keagenan menjadi faktor utama yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu adanya penguatan pengawasan dari pemerintah pusat, peningkatan transparansi dalam pengelolaan PAD, serta penerapan sistem insentif yang mendorong pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola keuangan mereka. Dengan demikian, teori keagenan dapat menjadi dasar dalam merancang kebijakan fiskal yang lebih akuntabel dan mendorong daerah untuk mencapai kemandirian keuangan yang lebih baik di masa depan

5 Kesimpulan ← Book Antiqua, 12 pt, Bold

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dari sisi rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan pola hubungan yang konsisten yaitu hubungan instruktif.
2. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo berdasarkan rasio efektivitas PAD menunjukkan kriteria yang sama, yaitu tidak efektif.
3. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dari sisi rasio efisiensi keuangan daerah mencerminkan kriteria yang sama, yaitu tidak efisien.
4. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo yang ditinjau dari rasio desentralisasi menunjukkan kriteria dengan proposi yang umum.
5. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo berdasarkan rasio ketergantungan keuangan menunjukkan kriteria yang sesuai dengan proposi yang umum.

Daftar Pustaka

- Aditya, H. P. (2022). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan (Studi Pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021). *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 16(1), 10-22.
- Angin, P., Natalian, E., & Bharata, R. (2023). Analisis rasio keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2022. *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU)*, 1 (3)(3), 173-183.
- Arafah, N., Neneng, S., & Marpaung, K. (2021). Analisis kemandirian keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan masyarakat di kabupaten kotawaringin barat. *JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata*, 1(1), 1-7.

<https://doi.org/10.52300/jepp.v1i1.3505>

- Arfan, R., Ambartiasari, G., Akbar, I., & Nanda, N. (2023). Analisis Rasio Pendapatan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah Pada Kota Banda Aceh Tahun 2017- 2020. *Jurnal Economina*, 2(4), 979-992. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i4.481>
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *Analisis Kemandirian dan ketergantungan keuangan daerah dan hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sarolangun*. 6.
- Awani, M. F., & Hariani, S. (2021). Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 95-102. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.158>
- Caesaktiti, W. H. A., Rusdarti, R., & Oktavilia, S. (2021). Peran Gender gap Memoderasi Rasio Ketergantungan, PDRB, Belanja Publik Terhadap IPM Jawa Tengah 2016-2020. *Business and Economic Analysis Journal*, 1(2), 122-133. <https://doi.org/10.15294/beaj.v1i2.33591>
- Dara Nadeya Dinanty, Nur Ainiyah, Hartono Hartono, & Nurdiana Fitri Isnaini. (2023). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Dan Rasio Keuangan Di Kantor Kecamatan Gedeg Periode 2017-2021. *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 3(4), 173-183. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i4.874>
- Darmastuti, W. Y., Susilowati, E., & Tannar, O. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Proaksi*, 9(1), 1-13. <https://doi.org/10.32534/jpk.v9i1.1913>
- Dian Mawardi, Kukuh Harianto, & Mawar Ratih Kusumawardani. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pada Kegiatan Bappeda Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017-2021 Menggunakan Konsep Value for Money. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 1(4), 72-80. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v1i4.611>
- Digdowiseiso, K., & Kaliwattu, D. (2023). Analisis Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal Dan Efektivitas Fiskal Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2018-2022. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(1), 219-228. <https://doi.org/10.55681/jige.v4i1.573>
- Dja'wa, A. (2021). Analisis Kemampuan Serta Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2012-2016. *Cakrawala Ilmiah*, 1(4), 481-488.
- Drastiana, T., & Himmati, R. (2021). *Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dan*. 1(November), 51-65.
- Edison, E., Susilawati, E., & Bansa, Y. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya terhadap Belanja Modal Kabupaten Batang Hari. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 13(2), 84. <https://doi.org/10.33087/eksis.v13i2.303>
- Ekonomi, J., dan Akuntansi, M., Permana, D., Telaumbanua, S., & Simanjuntak, E. (2024). Analisis Rasio Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2016-2022. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(Vol. 2 No. 4 (2024): Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi), 45-53.
- Fitrianti, M., & Sari, V. F. (2024). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 6(1), 206-218. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.1114>
- Haridison, A., & Permana, D. (2021). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 9(2), 53-74. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v9i2.5396>
- Irwan Moridu. (2021). Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai. *Jurnal Sinar Manajemen*, 8(2), 90-97. <https://doi.org/10.56338/jsm.v8i2.1643>
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). *Theory Of The Firm : Managerial Behavior , Agency Costs And Ownership Structure I . Introduction and summary In this paper WC draw on recent progress in*

- the theory of (1) property rights, firm. In addition to tying together elements of the theory of e. 3, 305-360.*
- Julaeha, R. S. (2024). Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban. *Jurnal Nirta: Studi Inovasi*, 4(1).
- Juliansyah, E., & Insaniyah, M. (2023). Analisis Rasio Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten Garut). *Digital Economic, Management and Accounting Knowledge Development*, 05(01), 1-16.
- Karmeli, E., Haryadi, W., & Muslimin, M. (2022). Analisis Kemandirian Daerah Dan Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 10(1), 52-60. <https://doi.org/10.58406/jeb.v10i1.730>
- Keasaman, D., Pelabuhan Pengasinan, D. I., Jakarta, P., & Mariah, Y. (2021). Jurnal Indonesia Sosial Sains. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(3), 494.
- Kondjol, E. H., Saint, P., & Sorong, P. (2021). RASIO KEUANGAN UNTUK MENGETAHUI KINERJA PEMERINTAHAN. *Jurnal Pitis AKP*.
- Lailiyah, N. I., & Desitama, F. S. (2023). Kemandirian Keuangan, Rasio Efisiensi, Rasio Solvabilitas Anggaran dan Rasio Pertumbuhan terhadap Financial Distress Pemerintah Daerah. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 1952-1973. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i3.5868>
- Machfud, M., Asnawi, A., & Naz'aina, N. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 5(1), 14. <https://doi.org/10.29103/j-mind.v5i1.3423>
- Mahmudi. (2010). *Manajemen kinerja sektor publik* (Mahmudi (ed.); 3 ed.). UPP STIM YKPN, 2019.
- Marinus Ronal, & Albert Agus Massua. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen dan Ekonomi*, 1(2), 181-189. <https://doi.org/10.59024/semnas.v1i2.63>
- Marliani, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi)*, 14(1), 11-20. <https://doi.org/10.37151/jsma.v14i1.84>
- Mataris, H., & Digdowiseiso, K. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019. In *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora* (Vol. 7, Nomor 1). <https://doi.org/10.47313/pjsh.v7i1.1049>
- Maulana, S. (2023). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *Journal of Metaverse Adpertisi*, 2(2), 10-16.
- Maulina, F., & Rhea. (2019). *Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada pemerintah provinsi kalimantan barat)*. 2(1), 11-22.
- Melani, T., Rohmah, F. N., Alghifari, M. E., & Kusfita, H. A. (2024). Kinerja Keuangan Kabupaten Kediri Ditinjau Dari Rasio Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2018-2023. *Paraduta: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(3), 96-101.
- Mulyani, S., & Fitra, H. (2023). Pengaruh Rasio Derajat Disentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA terhadap Alokasi Belanja Modal di Kabupaten/Kota Sumatera Barat. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 1(2), 135-144. <https://doi.org/10.24036/jnka.v1i2.11>
- Muslim, C., Dja'wa, A., & Hastuti, H. (2023). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Kendari. *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, 2(02), 148-156. <https://doi.org/10.62668/bharasumba.v2i02.586>
- Nalle, F. W., Oki, K. K., & Sangaji, P. M. M. (2021). Analysis of regional financial capacity in the context of implementing regional autonomy in the province of East Nusa Tenggara. *Inovasi*, 17(1), 184-197.

- Nuzullestary, V., & Mulyaningsih, E. (2021). Kinerja Pengelolaan Keuangan Dan Tingkat Kemandirian Pemerintah Kota Cilegon Berdasarkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015-2019. *Tirtayasa Ekonomika*, 16(1), 44. <https://doi.org/10.35448/jte.v16i1.10175>
- Oktaviani, E., & Marini, Y. (2023). Analisis Rasio Kemandirian, Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Realisasi Keuangan Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis (JIKABI)*, 2(2), 97-105. <https://doi.org/10.31289/jbi.v2i2.2964>
- Pundissing, R., & Pagiu, C. (2021). Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara. *Paulus Journal of Accounting (PJA)*, 2(2), 3. <http://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/pja/article/view/267>
- Putri, R. S., Fermansyah, D., Eliza, A., & Suharto, S. (2021). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(1), 60. <https://doi.org/10.29300/aij.v7i1.4071>
- Qur'ani, S., & Panggiarti, E. K. (2021). the Analysis of Territory Financial Ratio As Performance Value in the Government of Magelang City. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 60-70.
- Rahman, A. Z., & Saputra, F. L. (2022). Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap. *Humanika*, 22(2), 117-126. <https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.54277>
- Roychana, H. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020. *Jurnal Riset Daerah*, 22(4), 4321-4333.
- Ruqidul Hajah Alhabsi, Nuwun Priyono, & Risma Wira Bharata. (2023). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2021. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(2), 212-222. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v1i2.523>
- Siregar, A. O., & S, I. M. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan. *Image : Jurnal Riset Manajemen*, 9(1), 1-19. <https://doi.org/10.17509/image.v9i1.23998>
- Sonbay, Y. Y. (2022). Kritik Terhadap Pemberlakuan Teori Agensi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Suku Boti. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 6(2). <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i2.5176>
- Sriwijaya, P. N., Sriwijaya, P. N., & Sriwijaya, P. N. (2005). Analisis Pengaruh Solvabilitas dan Derajat Desentralisasi Terhadap Financial Distress Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Media Akuntansi*, 117-130.
- Susanto, H. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota mataram. 7(1), 81-92.
- Syaifullah Sofyan. (2022). ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 - 2019. 9, 356-363.
- Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(2), 98-114. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666>
- Toniga, C. C., Manopo, W. S., & Rogahang, J. J. (2021). Analisis Common Size pada Perusahaan PT. Federal International Finance (FIF GROUP) Cabang Manado. *Jurnal Productivity*, 2(6), 471-476.
- Trianto, A. (2016). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 12(1), 65-77. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v12i1.92>
- Tumija, & Sinta, G. (2022). Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 9(2), 61-78.
- Wahyu Luthvia, A., Triyono, T., & Sasongko, N. (2023). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah

Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Intervening. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(3), 1861-1880. <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i3.263>